

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta
- L.J. Van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Paisol, Burlain, 2015, *Sistem Hukum di Indonesia*, NoerFikri Offset, Palembang
- Harahap, Zairin, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usah Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Makarim, Edmon, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Edisi 3*, Rajawali Pers, Depok
- Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Herlien, Budiono, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta
- I. Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Siyoto, Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta

Sunggono, Bambang, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rafiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta

## **B. Jurnal**

Sri Yuniati, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4 Desember 2017

Marisco A. Umbas, “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Fungsi Notaris”, *Lex Privatum*, Vol.I/No.4/Oktober/2013

Mardiyah, Cs, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2016 – 2017

Thamaroni Usman, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Jual Beli Barang Dari Perspektif Hukum Perdata”, *Indonesian Private Law Review* Volume 1 Issue 2, 2020

I Wayan Ariadi, “Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)*, Vol. 5, No. 1 : 175 – 183, 2016

Dini Sukma Listyana, Cs, “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda”, *Jurnal Verstek* Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret

Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal TAPIS* Vol.11 No.1 Januari-Juni 2015

Luthvi Febryka Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *NEGARA HUKUM*: Vol. 2, No. 1, Juni 2011

Abdul Rachmad Budiono, Cs, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum”, *Volume 4, Nomor 1*

Ida Ayu Putu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2015 - 2016

Husnul Hudzaifah, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia”, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 5, Mei 2015

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi

Widya Sujud Nadia, “Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018

Guritno Tri Kuncoro, “Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”, Privat Law Volume 6 Nomor 1 2018, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Luthvi Febryka Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Muhammad Ricky Ilham Chalid, “Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0”

Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021)

### **C. Hasil Penelitian**

Devina, “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris”, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019

Joan Venzka Tahapary, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata”, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2011

Prayudicia Tantra Atmaja, “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam *E-Commerce*”, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019

Agung Fajar Matra, “Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2012

Tiska Sundani, “Analisis Hukum Atas Penggunaan Dan Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik.”, Tesis, Medan: Univeritas Sumatera Utara, 2017

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang ketentuan pengangkatan, larangan PPAT

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang ketentuan pengangkatan, larangan PPAT

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Pasal 1

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Mutasi, Pemberhentian, dan Perpanjangan Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

Kode Etik Notaris

#### **E. Internet**

Rizal Setyo Nugroho, “Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April”, (<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/213418865/rekap-kasus-corona-indonesia-selama-maret-dan-prediksi-di-bulan-april?page=all>.) Diakses pada tanggal 04 Juni 2021, pukul 19.41 WIB

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, (<https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>) Diakses pada tanggal 04 Juli 2021, pukul 22.48 WIB

Vanya Karunia Mulia Putri, “Fungsi Dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli”, (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/13/130257669/fungsi-dan-tujuan-hukum-menurut-para-ahli?page=all>) Diakses pada tanggal 08 Juli 2021, pukul 22.09 WIB

Antara, “Ini Dasar Hukum Persidangan Secara Daring yang Ditetapkan Mahkamah Agung”, (<https://nasional.tempo.co/read/1400670/ini-dasar-hukum-persidangan-secara-daring-yang-ditetapkan-mahkamah-agung>) Diakses pada tanggal 05 Juni 2021, pukul 19.53 WIB

I. Made Pria Dharsana, “Implikasi UU Cipta Kerja, PP & Permenkumham Terhadap Pendirian Perseroan Perseorangan”, (<https://kabarnotariat.id/2021/07/30/implikasi-uu-cipta-kerja-pp->

permenkumham-terhadap-pendirian-perseroan-perseorangan/) Diakses pada tanggal 19 September 2021, pukul 20.19 WIB

Pieter Latumeten, “Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris”, (<https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/>) Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 19.57 WIB

Kanal Ekonomi, “Dorong Kemudahan Berusaha UMK, Kanwil Kemenkumham Sumut Gelar Dialog Interaktif”, (<https://seputarsumut.com/ekonomi/dorong-kemudahan-berusaha-umk-kanwil-kemenkumham-sumut-gelar-dialog-interaktif/>) Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 19.01 WIB

Reski Kurnia, “Kemenkumham Sumut Gelar Dialog PMPJ Bagi Notaris”, (<https://nawacitapost.com/gaya-hidup/2021/08/24/kemenkumham-sumut-gelar-dialog-pmpj-bagi-notaris/>) Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 09.12 WIB

Biro Humas, Hukum dan Kerja sama, “Pentingnya Penerapan PMPJ oleh Notaris”, (<https://www.kemenkumham.go.id/berita/pentingnya-penerapan-pmpj-oleh-notaris>) Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 13.31 WIB

Pingit Aria, “Turunan UU Cipta Kerja, Dirikan PT Perorangan Bisa Tanpa Akta Notaris”, (<https://katadata.co.id/pingitaria/berita/60346b911e289/turunan-uu-cipta-kerja-dirikan-pt-perorangan-bisa-tanpa-akta-notaris>) Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 22.31 WIB

CNN Indonesia, “Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris”, (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>) Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 20.21 WIB

I. Made Pria Dharsana, “Hilangnya Peran Notaris dalam Pendirian PT UMKM”, (<https://kabarnotariat.id/2021/02/26/hilangnya-peran-notaris-dalam-pendirian-pt-umkm/>) Diakses pada tanggal 31 Agustus 2021, pukul 19.38 WIB

Ni Nyoman Indah Ratnasari, “Permenkumham 21/2021 Terbit, Ini Prosedur Pendirian Perseroan Perorangan”, (<https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2021/05/23/permenkumham-21-2021-terbit-ini-prosedur-pendirian-perseroan-perorangan/>) Diakses pada tanggal 29 September 2021, pukul 20.11 WIB

Salmaa Awwaabin, “Pendekatan Penelitian: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh Lengkapnya”, (<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/>) Diakses pada tanggal 30 Juli 2021, pukul 23.29 WIB

Humas, “Presiden Tetapkan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional”, (<https://setkab.go.id/presiden-tetapkan-bencana-nonalam-penyebaran-Covid-19-sebagai-bencana-nasional/>) Diakses pada tanggal 02 September 2021, pukul 19.57 WIB

Edmon Makarim, “Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.M”, (<https://law.ui.ac.id/v3/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-oleh-dr-edmon-makarim-s-kom-s-h-ll-m/>) Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, pukul 19.43 WIB

Mahatma Chryshna, “Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca Libur Lebaran 2021”, (<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/lonjakan-kasus-Covid-19-pasca-libur-lebaran-2021>) Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 20.31 WIB

Barratut Taqiyyah Rafie, “Sampai tanggal berapa PPKM diperpanjang? Ini informasinya”, (<https://newssetup.kontan.co.id/news/sampai-tanggal-berapa-ppkm-diperpanjang-ini-informasinya?page=all>) Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021, pukul 20.33 WIB

Admin, “Nilai Organisasi Melempem, Otty Hari Chandra Dorong Revisi UUJN Imbangi Omnibus Law Ciptaker”, (<https://innews.co.id/nilai-organisasi-melempem-otty-hari-chandra-dorong-revisi-uujn-imbangi-omnibus-law-ciptaker/>) Diakses pada tanggal 1 September 2021, pukul 22.26 WIB

Akhiruddin, “Akta Notaris Drive Thru Perlu Dipertanyakan”, <https://kabarnotariat.id/2021/06/28/akta-notaris-drive-thru-perlu-dipertanyakan/> Diakses pada tanggal 27 Nopember 2021, pukul 18.37 WIB

## **F. Sumber-Sumber Lainnya**

Wawancara